

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara global, dunia tengah bertransformasi menuju era *Society 5.0*, yang artinya sentralisasi kehidupan manusia ditandai dengan integrasi sekat ruang digitalisasi dalam setiap sektor, terkhususnya terjadi secara nyata pada sektor pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah sebuah proses dalam mengubah sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya dalam pengajaran dan pelatihan. Oleh karenanya, pembelajaran Pendidikan Pancasila hadir sebagai usaha sadar dalam membentuk sikap dan karakteristik warga negara yang baik, karena pada proses pembelajarannya tidak hanya berfokus pada pemahaman nilai materi, tetapi juga bagaimana peserta didik mampu membentuk cara berpikir yang logis dan bersikap sebagai warga negara yang demokratis, rasional, serta bertanggung jawab di tengah pesatnya arus globalisasi akibat teknologi ini.

Konsep *Society 5.0* sendiri hadir dan menempatkan teknologi, termasuk kecerdasan buatan *Artificial Intelligence (AI)*, sebagai sarana untuk mendukung kehidupan manusia yang lebih bermakna dan berorientasi pada nilai kemanusiaan (Fukuyama, 2018). Dalam sejarahnya, negara Jepang merupakan penggagas lahirnya era *Society 5.0* yang digambarkan sebagai “*A society centered on humanity, which harmonizes economic progress with the solution of social issues through a system that closely integrates cyberspace and physical space*” (Ar & Faruqi, 2019).

Demikian, di tengah adaptasi zaman, peran pendidikan semakin vital dan dinamis sehingga seorang pendidik pada zaman ini tidak lagi hanya menjadi informan, tetapi juga menjadi pemandu dan pemberdaya yang membantu peserta didik memahami dunia yang semakin kompleks di era *Society 5.0*. Dewasa ini, kita sadar betul bahwa kita tergerus arus informasi publik yang berkembang sangat cepat dan masif, baik yang dijangkau melalui media digital maupun teknologi berbasis kecerdasan buatan AI.

Oleh karenanya, dunia pendidikan turut menjadi lembaga yang menerima kehadiran pesatnya arus informasi publik, dan peserta didik turut menyaksikan berbagai konflik negara yang berkaitan pada kebijakan publik yang ditorehkan oleh pemerintah atau lembaga tertentu yang informasinya melintasi gawai digital peserta didik, seperti konflik yang berkaitan dengan efisiensi, keadilan, hak kebebasan dan kontrol, pertumbuhan ekonomi yang mengancam nilai dari hak individu bahkan kepentingan umum yang terkhususnya terjadi di negara Indonesia ataupun pada skala internasional.

Dengan demikian, peserta didik yang merupakan bagian dari warga negara perlu memiliki kemampuan dalam memahami dan mengkritisi terkait masalah kebijakan publik yang terjadi secara faktual agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru atau bersifat manipulatif. Sebagai solusinya, kompetensi kemampuan analitis terhadap kebijakan publik di era *Society 5.0 ini harus digaungkan oleh seorang pendidik kepada peserta didik sebagai upaya pembentukan warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab*. Sejalan dengan kompetensi tersebut, dalam Kurikulum Merdeka terdapat 8 poin dimensi utama profil lulusan yang menjadi acuan peningkatan kemampuan analitis terhadap kebijakan publik, yakni dimensi kewargaan dan penalaran kritis, dan oleh karenanya mata pelajaran Pendidikan Pancasila pada tingkat sekolah menengah memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan kemampuan tersebut.

Dalam kajian Pendidikan Kewarganegaraan, kompetensi analitis terhadap kebijakan publik berkaitan dengan beberapa pengembangan kompetensi diantaranya, pertama adalah keterlibatan aktif warga negara (*Civic Engagement*), dalam kehidupan sosial dan politik melalui partisipasi dan kepedulian terhadap isu-isu publik yang terjadi pada masa lampau ataupun terkini. Kedua, keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*), khususnya keterampilan intelektual dalam menganalisis persoalan publik, dan mengevaluasi berbagai sudut pandang, serta mengambil keputusan secara rasional (Branson, 1998).

Ennis (2011) juga menjelaskan bahwa berpikir kritis mencakup kemampuan menganalisis argumen, menilai keabsahan sumber informasi, dan menarik simpulan yang logis sehingga pada era *society 5.0*, kemampuan analitis terhadap permasalahan kebijakan publik ini menjadi semakin relevan karena kompleksitas informasi yang beredar menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam menyikapi berbagai persoalan publik. Tentunya peserta didik perlu dipersiapkan dan dibekali dengan dasar dan kemampuan tersebut yang diintegrasikan pada proses pembelajaran yang berlangsung, terkhususnya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila itu sendiri.

Namun, berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa praktik pembelajaran Pendidikan Pancasila tingkat sekolah menengah masih cenderung didominasi oleh pendekatan *teacher-centered* yang menekankan penyampaian materi secara teoritis. Pendekatan pembelajaran yang minim ruang diskusi dan dialog akan berpotensi membatasi antusiasme dari keterlibatan peserta didik dalam kegiatan berpikir kritis, berargumentasi, dan menganalisis isu kebijakan publik secara aktif.

Kondisi tersebut diperkuat oleh data nasional yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan penalaran peserta didik di Indonesia masih menghadapi tantangan. Hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) tahun 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi membaca peserta didik Indonesia masih berada pada peringkat bawah dibandingkan negara lain. Temuan ini mengindikasikan bahwa peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami informasi secara mendalam, menghubungkan berbagai gagasan, serta menganalisis permasalahan yang bersifat kompleks.

Rendahnya kemampuan literasi dan penalaran tersebut nyatanya berdampak pada keterbatasan peserta didik dalam menyikapi isu kebijakan publik secara kritis dan rasional. Pada skala tingkat daerah, kondisi literasi di Kota Bandung menunjukkan adanya kesenjangan antara pembangunan ekosistem literasi dan praktik literasi masyarakat. Data Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung tahun 2025 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Bandung mencapai angka 87,92 dengan kategori tinggi, sedangkan Tingkat Gemar Membaca (TGM) berada pada angka 56,16 dengan kategori sedang. Data tersebut menunjukkan

bahwa meskipun dukungan terhadap literasi telah berkembang dengan baik, kemampuan literasi yang berorientasi pada pemahaman mendalam dan analisis kritis masih perlu diperkuat, khususnya melalui proses pembelajaran di sekolah.

Namun, apabila pembelajaran Pendidikan Pancasila di era *Society 5.0* ini masih berfokus pada penguasaan materi secara teoritis tanpa memberikan ruang yang luas dan memadai bagi peserta didik untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat secara merdeka, dan menganalisis isu kebijakan publik, maka tujuan tersebut sulit tercapai secara optimal. Sedangkan inovasi pembelajaran Pendidikan Pancasila dalam komponen pendekatan harus selalu dilakukan oleh semua praktisi pendidikan, khususnya guru.

Menurut Prof. Dr. Abdul Aziz Wahab, M.A., dalam bukunya bertajuk *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, salah satu tindakan inovasi itu adalah pergeseran dalam penerapan pendekatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dari pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan isi (*content-based curriculum*) berevolusi pada orientasi yang berfokus pada prosesnya (*process-based curriculum*), lebih lanjutnya kini telah bergeser pada paradigma inovasi yang terbaru, yakni pendekatan pada kemampuan kompetensi peserta didik itu sendiri (*competency-based curriculum*). Sehingga dalam pembelajaran di sekolah diperlukan kurikulum yang mampu mengakumulasi kreativitas peserta didik dalam proses berpikir, berargumentasi, sekaligus menerapkan nilai demokrasi, yakni menghargai pendapat orang lain. Salah satu metode pembelajaran yang dinilai relevan adalah metode debat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), debat adalah pembahasan, diskusi, dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal atau subjek yang saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing dan melakukan sanggahan dan pembelaan terhadap argumen yang dilontarkan. Sejalan dengan hal itu, Hendri Guntur Tarigan (“Retorika 1990:120”) *Debat ialah aktivitas adu argumentasi antar pribadi atau kelompok dngan tujuan mencapai kemenangan satu pihak.*

Dalam pelaksanaannya, penggunaan metode debat pada pembelajaran berpeluang memberikan peserta didik kesempatan untuk meneliti dan mengaktualisasikan argumen secara jelas dan logis agar tercapai simpulan yang

rasional. Debat yang baik juga memerlukan kemampuan dan pengetahuan yang luas, hasil kajian reflektif, berpikir kritis, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Peserta didik yang tidak terlibat langsung dalam proses debat masih dapat berpartisipasi dalam proses belajar seperti mendengarkan informasi (mungkin) baru/aktual, menilai argumen-argumen yang dikemukakan peserta debat, menilai kualitas penyajiannya, dan membuat keputusan atau simpulan alternatif.

Dalam berdebat, terdapat tujuan utama dalam menyampaikan argumentasi ialah seni dalam meyakinkan cara berpikir kepada tim lawan debat. Menganggap apa yang disampaikan oleh tim berlawanan adalah bentuk kecacatan berpikir dengan memperkuat pernyataan argumentasinya melalui penalaran yang lebih realistis. Melalui debat, peserta didik dilatih memiliki keberanian dalam seni berbicara menyampaikan antarkata, kalimat dan data serta memahami isu publik secara lebih mendalam, mengemukakan pendapat berdasarkan alasan yang logis, menanggapi argumen pihak lain, serta menarik simpulan secara rasional. Proses tersebut sejalan dengan indikator kemampuan berpikir kritis yang menekankan analisis, evaluasi, dan penarikan simpulan.

Dalam implementasinya, penerapan metode debat dalam konteks menganalisis konflik kebijakan publik telah dilaksanakan di salah satu sekolah tingkat menengah, yakni Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Kota Bandung, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Metode debat ini terakhir kali diimplementasikan di kelas XII-B tahun ajaran 2025-2026 pada bab materi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Guru pengampu menyampaikan, bahwa saat praktik metode debat pada pembelajaran Pendidikan Pancasila, motivasi peserta didik cukup meningkat dalam pembelajaran tersebut, paling tidaknya mereka berhasil berani untuk berkolaborasi dengan tim dan melatih keterampilan dalam berbicara.

Sejalan dengan itu, penelitian Wijaya (2020) menunjukkan bahwa metode debat aktif mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa pada mata kuliah Kewirausahaan, dengan skor rata-rata meningkat dari 1,9 (pra tindakan) menjadi 2,8 pada siklus I, dan 3,6 pada siklus II. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus peningkatan kemampuan berpikir kritis melalui debat aktif, sementara

perbedaannya ada pada subjek penelitian (mahasiswa vs. siswa kelas X). Meski metode debat telah digunakan dalam proses pembelajaran, penerapannya masih cenderung formal dan terbatas pada mata pelajaran tertentu. Penelitian ini ke depannya bertujuan untuk menjawab celah tersebut dengan menerapkan metode debat aktif yang terstruktur untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui kemampuan analitis terhadap isu kebijakan publik.

Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan konsep pendidikan era *Society 5.0* yang melibatkan ruang pendidikan dan kecerdasan buatan (AI), namun tetap didominasi oleh kemampuan manusia. Serta bertujuan untuk menekankan keterlibatan merata seluruh siswa, bukan hanya peserta didik yang terlihat dominan dari segi sosial ataupun kognitif, guna menghasilkan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kemampuan berpikir analitis di kelas menggunakan penerapan metode debat dengan tema isu kebijakan publik.

Penelitian tindakan kelas ini memiliki signifikansi dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan kemampuan analitis isu kebijakan publik peserta didik. Metode debat dinilai efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang dinamis, mendorong partisipasi, serta melatih siswa menyampaikan pendapat secara logis dan terstruktur. Melalui diskusi argumentatif, kemampuan analisis, evaluasi, dan sintesis siswa meningkat. Oleh karenanya, rencana penelitian ini diharapkan menjadi acuan praktis bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan abad ke-21.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Metode Debat Pada Pembelajaran Pendidikan Pancasila Untuk Meningkatkan Kemampuan Analitis Peserta Didik Terhadap Kebijakan Publik Di Era *Society 5.0*”** dan penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji metode debat sebagai strategi pembelajaran aktif, tetapi juga memfokuskan pada pengembangan kemampuan analitis kebijakan publik dalam konteks era *society 5.0* yang menekankan integrasi teknologi, informasi publik, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila ditingkat sekolah menengah atas

sebagai kontribusi dalam pengembangan strategi pembelajaran yang relevan dengan tuntutan abad ke-21.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kemampuan peserta didik dalam berpikir analitis terhadap kebijakan publik pada pembelajaran Pendidikan Pancasila, diduga belum berkembang secara optimal, terutama dalam memahami substansi permasalahan kebijakan, menyusun argumentasi yang logis dan berbasis data, serta menarik simpulan secara rasional berdasarkan informasi yang tersedia.
2. Pemanfaatan media digital dan teknologi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di era *Society 5.0* belum sepenuhnya terintegrasi secara terarah sebagai sarana pendukung dalam mengembangkan kemampuan berpikir analitis peserta didik terhadap kebijakan publik.
3. Kegiatan literasi yang dilaksanakan peserta didik dalam pembelajaran cenderung masih berorientasi pada aktivitas mengakses dan mengumpulkan informasi, sementara kemampuan untuk memahami, menafsirkan, mengevaluasi, dan mengolah informasi tersebut dalam konteks analisis kebijakan publik belum menjadi fokus utama dalam proses pembelajaran.
4. Tidak menutup kemungkinan peserta didik hanya terbatas menguasai materi belaka saat pembelajaran Pendidikan Pancasila, dan belum mendapatkan ruang berdiskusi, berargumentasi, dan menerapkan berpikir analitis terhadap kebijakan publik yang diterapkan dengan nilai-nilai demokrasi yang dikemas melalui metode debat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kemampuan peserta didik dalam berpikir analitis pada pembelajaran Pendidikan Pancasila yang ditinjau dari kemampuan memahami permasalahan, menyusun argumen, dan menarik simpulan secara rasional?
2. Bagaimana karakteristik pemanfaatan media digital dan teknologi berbasis kecerdasan buatan AI oleh peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di era *Society 5.0*?
3. Sejauh mana peran kemampuan literasi peserta didik dalam mendukung peningkatan analitis kebijakan publik pada pembelajaran Pendidikan Pancasila?
4. Bagaimana penerapan metode debat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kemampuan analitis terhadap kebijakan publik di era *Society 5.0*?

D. Tujuan Penelitian

Proses penelitian ini tentu memiliki tujuan baik tujuan umum maupun tujuan khusus yang akan diharapkan akan menjadi manfaat bagi peneliti maupun dunia pendidikan, diantaranya:

1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini diharapkan mampu untuk mendeskripsikan implementasi metode debat pada pembelajaran Pendidikan Pancasila sebagai upaya meningkatkan kemampuan analitis peserta didik terhadap kebijakan publik di era *Society 5.0*, yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan meningkatnya kompleksitas permasalahan publik. Melalui penerapan metode debat, diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, mengemukakan argumen secara rasional, serta menyikapi persoalan kebijakan publik secara bertanggung jawab.

2. Tujuan Khusus

- a. Mendeskripsikan kondisi kemampuan peserta didik dalam menganalisis kebijakan publik pada pembelajaran Pendidikan Pancasila yang meliputi kemampuan dari memahami permasalahan, menyusun argumentasi, dan menarik simpulan secara rasional.

- b. Mendeskripsikan pemanfaatan media digital dan teknologi berbasis kecerdasan AI oleh peserta didik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di era *society* 5.0
- c. Menganalisis peran kemampuan literasi peserta didik dalam mendukung kemampuan analitis pada pembelajaran Pendidikan Pancasila.
- d. Mendeskripsikan penerapan metode debat pada pembelajaran Pendidikan Pancasila di SMAN 5 Kota Bandung sebagai strategi meningkatkan kemampuan analitis terhadap kebijakan publik di era *society* 5.0

E. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang peneliti uraikan dalam poin berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan metode debat sebagai salah satu metode pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan analitis terhadap kebijakan publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pembelajaran Pendidikan Pancasila yang menekankan pada pembelajaran kontekstual dan partisipatif, serta memperkuat pemahaman mengenai peran metode debat dalam membentuk kemampuan berpikir kritis dan argumentatif peserta didik di era *Society* 5.0.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti dalam menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif, khususnya metode debat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Selain itu, penelitian ini juga menjadi bekal bagi peneliti dalam mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogik sebagai calon pendidik yang mampu merancang pembelajaran kontekstual serta berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir analitis peserta didik.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan, khususnya sekolah, dalam upaya meningkatkan kualitas proses pembelajaran Pendidikan Pancasila yang lebih partisipatif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengembangan strategi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kemampuan berpikir kritis dan analitis peserta didik.

c. Bagi Guru Pendidikan Pancasila

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta alternatif metode pembelajaran bagi guru Pendidikan Pancasila dalam merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan bermakna. Melalui penerapan metode debat, guru diharapkan dapat mengembangkan kemampuan analitis terhadap kebijakan publik secara optimal, sekaligus mendorong partisipasi aktif dan sikap demokratis dalam proses pembelajaran.

d. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, khususnya dalam memahami, mengkaji dan menyikapi persoalan kebijakan publik yang berkembang di masyarakat. Melalui pembelajaran dengan metode debat, peserta didik diharapkan mampu mengemukakan pendapat secara rasional, *argumentatif*, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pembentukan warga negara yang cerdas dan berkarakter.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hasil penelitian kualitatif di bidang PPKn, serta menjadi rujukan awal bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan pada kajian metode debat sebagai pembelajaran aktif dan peningkatan literasi dari kemampuan analitis terhadap persoalan kebijakan publik di era *society 5.0*.

F. Definisi Variabel

1. Metode Debat

Metode debat merupakan salah satu metode pembelajaran yang dalam prosesnya melibatkan pertukaran argumentasi antara dua tim, baik secara individu maupun kelompok, terhadap suatu isu atau permasalahan tertentu. Argumentasi sendiri bertujuan untuk mengkaji penyelesaian masalah serta mendukung proses pengambilan suatu keputusan. Dalam pelaksanaannya, metode debat dilakukan secara struktur dengan memperhatikan komponen etika dalam berkomunikasi, penggunaan bahasan yang santun dan tidak mengandung unsur SARA, serta didukung oleh data dan fakta yang relevan. Sebagai metode pembelajaran, tentunya debat berperan efektif dalam pengembangan aspek berpikir kritis, kemampuan analisis, dan keterampilan komunikasi. Melalui metode debat, peserta didik juga didorong untuk bisa mengemukakan pendapatnya secara sistematis, mendengarkan dan mengevaluasi pandangan berbeda dari tim lawan, dan berusaha mempertahankan argumentasinya berdasarkan alasan yang logis dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan (Sufaat, 2025, hlm. 24). Pendekatan pembelajaran debat memberi kesempatan kepada siswa untuk meneliti dan mengaktualisasikan argumen secara jelas dan logis agar tercapai simpulan yang rasional. Sehingga pendekatan pembelajaran yang menggunakan metode debat secara langsung dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan penelaahan terhadap suatu permasalahan. Selain memberikan kebermanfaatan untuk peserta didik hingga bisa terlibat secara langsung sebagai peserta debat dan merasakan makna dalam proses belajarnya. Lebih lanjutnya, dengan menyimak berjalannya debat pun peserta didik dapat memperoleh informasi baru, memberikan evaluasi atau tanggapan yang konstruktif kepada tim debat. Dengan demikian, pembelajaran debat mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendorong partisipasi aktif, pengembangan kemampuan berpikir kritis, dan peningkatan keterampilan komunikasi peserta didik.

2. Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Pembelajaran Pendidikan Pancasila memegang peranan penting dalam membentuk karakter serta moral masyarakat Indonesia. Kemajuan suatu bangsa tidak

hanya ditentukan oleh aspek pembangunan, tetapi juga oleh terwujudnya kehidupan yang berlandaskan pada nilai-nilai hukum dan norma yang diterapkan secara tepat dan berkeadilan. Aturan dan peraturan yang berlaku di Indonesia pada dasarnya disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Danniarti, 2017). Nilai-nilai tersebut tercermin dalam lima sila Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila, peserta didik diarahkan untuk memahami, menghargai, dan mengimplementasikan nilai-nilai moral tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Sunaryati, Setiawan, Darmawan, Nurlaela, & Dewi, 2023, hlm. 267).

Dalam sejarahnya, menjelaskan peran *citizenship education* (PKn) yang kini diadaptasi dengan nama Pendidikan Pancasila umumnya dijelaskan oleh ahli lainnya menggunakan istilah *Civic(s) Education* dengan mengemukakan peran *Citizenship Education* (PKn), Cogan dan Derricott (1998) menyatakan bahwa:

“Warga negara diartikan sebagai individu yang menjadi bagian dan anggota dari suatu masyarakat. Sementara itu, kewarganegaraan dipahami sebagai seperangkat karakteristik yang melekat pada status seseorang sebagai warga negara. Adapun pendidikan kewarganegaraan didefinisikan sebagai kontribusi yang diberikan melalui proses pendidikan dalam mengembangkan berbagai karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang warga negara”

Bagian akhir dari batasan tersebut mengantarkan kita untuk memahami peran *Citizenship Education* (PKn) dalam mendidik warga negara untuk menjadi warga negara yang baik yang secara universal diterima bahwa setiap warga negara yang mungkin dapat dibedakan antara orang yang baik "*a good person*" dengan warga negara yang baik "*a good citizen*", memiliki sejumlah kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu (*to reform certain duties*) termasuk tanggung jawabnya untuk mematuhi hukum, mem-bayar pajaknya, menghormati hak-hak orang lain berjuang

untuk kejayaan bangsa dan negaranya, serta secara umum memenuhi kewajibankewajiban sosialnya sebagai warga masyarakat.

3. Kemampuan Analitis

Uraian tersebut menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik. Dalam perspektif kewarganegaraan, terdapat perbedaan antara individu yang baik (*good person*) dan warga negara yang baik (*good citizen*). Warga negara yang baik tidak hanya dituntut memiliki karakter yang positif, tetapi juga mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kenegaraan dan sosial, seperti mematuhi hukum yang berlaku, memenuhi kewajiban perpajakan, menghargai hak sesama warga, berpartisipasi dalam upaya memajukan bangsa dan negara, serta menjalankan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam era *Society 5.0* yang penuh dengan akses digital saat ini, kemampuan berpikir analitis sangat dibutuhkan dalam menangani informasi yang semakin kompleks dan luas. Hal ini diperlukan untuk memilah dan memilih informasi yang valid dan akurat, serta menghindari terjebak pada informasi yang salah atau tidak relevan. Menurut Matthew Senangsa pada bukunya yang bertajuk *Terampil Berpikir Analitis dan Kritis* (2023:hlm.6-7), berpikir analitis merupakan kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Berpikir analitis melibatkan proses berpikir sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah, sementara berpikir kritis melibatkan proses evaluasi dan penilaian terhadap ide-ide dan informasi yang ada. Kemampuan berpikir analitis dan kritis dapat dikembangkan dengan latihan dan pengalaman. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dan efektif, serta menghasilkan solusi yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Sementara itu, keterampilan berpikir analitis dan kritis sangat penting dalam bidang pendidikan. Siswa yang terampil dalam berpikir analitis dapat memecahkan masalah dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konsep yang dipelajari. Dalam kelas, mereka dapat mengajukan pertanyaan yang tepat

dan mengembangkan argumen yang valid. Berpikir analitis juga membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir logis dan kritis. Menurut Oktariani et al. (2023), dalam teorinya, Bloom (2000) mengatakan bahwa kemampuan analisis masuk ke dalam kategori berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*), yang mencakup kemampuan membedakan, mengorganisasi, dan menghubungkan. Karakteristik utama kemampuan analisis meliputi berpikir logis, kritis, sistematis, dan objektif dalam memproses informasi serta menyajikannya dalam bentuk yang lebih terstruktur dan rinci.

4. Kebijakan Publik

Menurut Dr. Riant Nugroho, pada bukunya yang bertajuk *Public Policy* (2018: hlm.206-2007) menegaskan bahwa kebijakan publik terbentuk dari dua kata: kebijakan dan publik. Kebijakan (*policy*) adalah *an authoritative decision. Decision made by the one who holds the authority, formal or informal*. Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi, Kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan politik yang telah dilembagakan dan ditetapkan oleh negara sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, kebijakan publik juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan masyarakat dari kondisi yang ada menuju kondisi yang diharapkan sesuai dengan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, kebijakan publik lebih tepat dipandang sebagai suatu fakta strategis dibandingkan sekadar fakta politik maupun teknis. Dalam proses penyusunannya, kebijakan publik tidak terlepas dari berbagai preferensi politik yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat, terutama pada tahap perumusan kebijakan. Sebagai suatu strategi, kebijakan publik tidak hanya diwujudkan dalam bentuk tindakan atau keputusan yang bersifat positif, tetapi juga mencakup pilihan untuk tidak mengambil tindakan tertentu. Setiap kebijakan pada dasarnya melibatkan proses seleksi yang mengharuskan adanya pilihan untuk menerima satu alternatif sekaligus menolak alternatif lainnya. Meskipun terdapat kemungkinan tercapainya solusi yang menguntungkan berbagai pihak (*win-win solution*), ruang untuk mewujudkannya sering kali terbatas. Akibatnya, kebijakan publik lebih banyak berada dalam situasi *zero-sum game*, yaitu kondisi ketika

penerimaan terhadap suatu kepentingan dilakukan dengan mengesampingkan kepentingan yang lain.

5. Peserta Didik

Dalam kajian etimologis, peserta didik disebut *tilmidz* dalam bahasa Arab yang berarti murid atau seseorang yang sedang menjalani proses pendidikan. Istilah lain yang juga digunakan adalah *thalib* dengan bentuk jamak *thullab*, yang bermakna pencari ilmu pengetahuan. Dengan demikian, peserta didik dipahami sebagai individu yang mengikuti kegiatan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan dan menjadi subjek dalam proses pembelajaran. Sebagai individu yang sedang berkembang, peserta didik memiliki berbagai potensi yang perlu diarahkan dan dikembangkan secara optimal melalui penyelenggaraan pendidikan. Peserta didik menempati posisi sentral dalam sistem pendidikan karena menjadi subjek sekaligus objek dalam seluruh proses pembelajaran dan transformasi pendidikan. Dalam perspektif psikologis dan pedagogis, peserta didik dipandang sebagai individu yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis, sehingga memerlukan bimbingan dan pengarahan yang berkelanjutan agar potensi yang dimilikinya dapat berkembang secara optimal sesuai dengan fitrah masing-masing (Rumi Restu, 1986/1997: hlm.97). Peserta didik juga dipahami sebagai manusia yang memiliki potensi tersembunyi yang harus diaktualisasikan melalui proses pendidikan agar mampu menjadi pribadi yang cakap, berkepribadian, dan berdaya guna dalam kehidupan bermasyarakat (Ar-Ruz Media, 2011: hlm. 119). Oleh karena itu, peserta didik tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan karena keberadaannya menjadi komponen utama dalam pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh.

6. Era Society 5.0

Di masa pendidikan era *Society 5.0* ini memungkinkan siswa akan belajar bersama robot sebagai pengganti guru. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era *society 5.0*. Untuk menghadapi tantangan tersebut, lembaga pendidikan perlu mengubah cara berpikirnya. Guru juga harus memperhatikan sumber belajar dan memberikan inspirasi kepada

peserta didik. Menurut Medi Mahendra dalam bukunya bertajuk *Literasi Untuk Peradaban* (2023: hlm.34), Era *Society 5.0* merupakan penyempurnaan dari konsep Revolusi Industri 4.0 di mana manusia sendiri menjadi komponen utama atau *Human-Centered* dengan basis teknologi. Era *Society 5.0* ini dapat menghilangkan kesenjangan antara sumber daya manusia dan *artificial intelligence* (AI) apabila tidak diintegrasikan dengan baik. Era *Society 5.0*, yang diperkenalkan oleh perdana menteri Jepang Shinzo Abe pada 21 Januari 2019, sendiri menciptakan urgensi untuk membuat terobosan baru yang dapat mewujudkan reformasi perekonomian. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sukmawati et al. (2022, hlm. 94) menyatakan bahwa era *Society 5.0* membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif, terhadap dunia pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat menuntut seluruh pihak untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. Dalam proses pembelajaran, sumber belajar tidak lagi terbatas pada buku, melainkan dapat diperoleh melalui internet dan media sosial. Oleh karena itu, guru perlu bersikap terbuka terhadap berbagai sumber informasi serta memiliki kemampuan untuk menyaring dan memanfaatkan informasi secara bijaksana. Dunia pendidikan juga dituntut untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar tidak tertinggal dari negara lain. Pada era *Society 5.0*, guru tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pembimbing yang memberikan perhatian terhadap perkembangan peserta didik. Pemanfaatan teknologi digital pada era ini diharapkan mampu mendukung pembangunan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, sehingga dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia.

G. Sistematika Skripsi

Berikut adalah rencana sistematika penulisan pada skripsi yang dirumuskan penulis:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi uraian mengenai gambaran umum penelitian yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian ini. Pada bab ini dijelaskan latar belakang

masalah yang memaparkan kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata terkait kemampuan peserta didik dalam menganalisis isu-isu publik pada pembelajaran Pendidikan Pancasila. Selain itu, bab ini mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang ditinjau dari aspek teoretis dan praktis. Bab pendahuluan juga memuat definisi operasional guna memberikan kejelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi yang menjelaskan susunan dan alur pembahasan penelitian secara menyeluruh.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini membahas kajian teori yang menjadi dasar konseptual dalam penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian, meliputi konsep Pendidikan Pancasila, metode debat sebagai salah satu metode pembelajaran aktif dan partisipatif, serta konsep kemampuan analitis terhadap kebijakan publik. Selain itu, bab ini juga mengkaji konsep pembelajaran, metode pembelajaran, metode debat, pendidikan pancasila, kemampuan analitis, kebijakan publik dan era society 5.0.

Selanjutnya, pada bab ini disajikan kerangka pemikiran penelitian yang menggambarkan alur logis hubungan antara permasalahan penelitian, faktor penyebab, solusi yang ditawarkan, serta hasil yang diharapkan. Kerangka pemikiran tersebut menunjukkan bahwa kemampuan analitis pada persoalan kebijakan publik peserta didik yang belum optimal dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila disebabkan oleh pesatnya arus informasi digital serta kecenderungan penggunaan metode pembelajaran konvensional.

Oleh karena itu, penerapan metode debat dipandang sebagai solusi pembelajaran aktif berbasis isu kebijakan publik yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, argumentatif, dan partisipatif peserta didik. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian serta arah analisis data yang dilakukan peneliti.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan berbagai aspek metodologis yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian. Uraian dalam bab ini mencakup pendekatan dan jenis

penelitian yang diterapkan, peran peneliti selama proses penelitian berlangsung, instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, sumber data penelitian, serta tahapan atau prosedur penelitian. Selain itu, bab ini juga memaparkan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, dijelaskan pula teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data sehingga menghasilkan temuan penelitian yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan paparan data hasil penelitian dan temuan penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai penerapan metode debat dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Paparan data dan temuan penelitian difokuskan pada proses pelaksanaan debat, peran guru dan peserta didik, serta dampaknya terhadap pengembangan kemampuan analitis peserta didik terhadap persoalan kebijakan publik di era *Society 5.0*, khususnya di SMAN 5 Kota Bandung.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi simpulan dari seluruh rangkaian penelitian berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain menyajikan kesimpulan, bab ini juga memuat berbagai rekomendasi yang ditujukan kepada guru, pihak sekolah, peserta didik, serta peneliti berikutnya. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan maupun pengembangan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.